

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI
SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

Oleh :

**Sri Yunita Latif
NIM : S2118094**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI
SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN
DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Oleh

SRI YUNITA LATIF

NIM: S2118094

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Melakukan Penelitian
Telah Disetujui dan Siap Untuk Diujangkan
Gorontalo, 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN: 0913078602


Marten Nusi S,IP M.AP
NIDN: 0901028502

Mengetahui



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN
DARING SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Oleh

SRI YUNITA LATIF
NIM: S2118094

Telah Memenuhi Syarat Untuk Dipertahankan Pada Komisi Penguji Ujian Skripsi

Tanggal Juni 2022

Komisi Penguji :

1. Dr. Arman M.Si

:

2. Marten Nusi S.Ip M.Ap

:

3. Dr. Imran Kamaruddin, SS,MM.,M.I KOM

:

4. Darmawaty Abdul Razak,S.IP.,M.AP

:

5. Balada Raf S.Sos M.Si

:

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN: 0913078602

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Sosial dan Politik



Darmawaty Abdul Razak,S.IP.,M.AP
NIDN:0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini (skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (SARJANA), baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni atas gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Pembimbing.
3. Dalam karya ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan publiskan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jeklas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian bari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh atau sanksi lain sesuai dengan norma/aturan yang berlaku pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, Juni 2022
Yang membuat Pernyataan



Sri Yunita Latif
Nim. S2118094

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal diutamakan).

(QS. Asy-syura: 43)

Tiada kata Selamat yang paling indah selain kata “SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU”
(NITA LATIF)

Dengan bangga kupersembahkan karya tulis ini kepangkuan terkasih dan tersayang papa tercinta (SUARDI LATIF) dan mama tercinta (INAR TAHIR) yang telah mengikhlaskan tenaga serta cucuran keringat dalam membersarkan, mendidik, dan membiayai, serta doa disetiap sujud untuk keberhasilan studiku.

Terspesial untuk kedua kakak dan adik prempuanku dan keluarga besar LATIF yang telah membantu dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillahirobbil'alamin, banyak nikmat yang telah ALLAH berikan, segala puji hanya untuk ALLAH. Tuhan yang maha Esa atas segala Rahmat, serta Hidayahnya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJRAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO" skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

penulis menyadari bahwa setiap usaha untuk mencapai kesuksesan akan mengalami hambatan, tantangan dan rintangan. Demikian pula yang dialami penulis dalam penyusunan skripsi ini namun dengan tekad, kemauan dan kerja keras serta dibarengi dengan adanya dorongan, doa dari orang tua, keluarga, rekan-rekan dan bimbingan dari bapak ibu dosen maka semua hambatan, tantangan dan rintangan dapat teratasi.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama atas jasa dari bapak DR. Arman M.SI dan bapak Marten Nusi S.ip M.Ap selaku pembimbing I dan II yang telah ikhlas membimbing dari awal penelitian hingga penyusunan skripsi.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,

3. Bapak Dr.Arman M.Si selaku Dekan Fakultas Sospol,
4. Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.Ip, M.Ap Selaku Ketua Jurusan Sospol Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini,
6. Kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan studiku
7. Kepada keluarga LATIF-TAHIR yang selalu memberikan dorongan untuk mneyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kelas Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 ucapan terimakasih untuk kebersamaan kalian.
9. Teman- teman Gerabah yang senantiasa ada, untuk Devi, Pita, Atin, dan Lina.
10. Teman-teman “kos-Nur” terimakasih untuk bantuan yang kalian berikan.
11. semua pihak yang membantu, memotivasi, dan memeberikan dorongan baik moril maupun fisik.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, dukungan, serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak memperoleh imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Gorontalo, Juni 2022

Sri Yunita Latif

ABSTRAK

SRI YUNITA LATIF, NIM. S.21.18.094, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan dalam proses belajar daring di SDN 15 Tilamuta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian adalah implementasi program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum telah dengan baik. Adanya kendala dan permasalahan dalam proses belajar mengajar tidak lepas dari dukungan komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan kepada orang tua siswa telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal dukungan sarana berupa handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar secara daring. Hal ini tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar daring diberlakukan kembali. Implementasi program belajar daring juga terkendala oleh tenaga guru yang kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring. Sekalipun proses belajar tetap berjalan dengan sistem pengaturan waktu belajar oleh masing-masing guru kelas dan mata pelajaran.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembelajaran Daring.

ABSTRACT

SRI YUNITA LATIF. S2118094. IMPLEMENTATION OF ONLINE LEARNING POLICY AT SDN 15 TILAMUTA IN BOALEMO DISTRICT

This study aims to determine the implementation of an online learning policy at SDN 15 Tilamuta. It employs a qualitative method. The data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is interactive analysis. The results of the study indicate that in general the online learning implementation in SDN 15 Tilamuta, Tilamuta Subdistrict in Boalemo District has been well. The obstacles and problems in the teaching and learning process cannot be separated from the support of good communication. It has been done by delivering policy messages to parents of students. It has been carried out by the school. Meanwhile, terms of supporting facilities in the form of cellphones, it is still an obstacle in the online teaching and learning process. It requires strategic steps in the future if the online learning process is reinstated. The online learning implementation is also constrained by the lack of teachers supporting the learning process of teaching online. However, the learning process continues with a learning time setting system by each class and subject teacher.

Keywords: policy implementation, online learning

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan	5
2.1.1 Konsep Kebijakan.....	5
2.1.2 Proses Kebijakan Publik	6
2.2 Pengertian Implementasi.....	9
2.3 Model-model Implementasi Kebijakan Publik	11

2.4 Pembelajaran Daring	24
2.5 Kebijakan Daring	27
2.6 Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian.....	30
3.4 Informan.....	31
3.5 Jenis Data	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	34
4.2 Hasil Penelitian	34
4.2.1 Komunikasi	35
4.2.2 Sarana Pembelajaran	37
4.2.3 Sumber Daya Manusia	39
4.3 Pembahasan.....	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 telah berdampak juga di sektor pendidikan terutama di Indonesia. Demi mengurangi penyebaran virus ini pemerintah menerapkan strategi social distancing. Salah satunya menutup sekolah kebijakan lainnya yang diberikan pemerintah yaitu proses belajar mengajar dilakukan dirumah dan belajar tatap muka dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan lementrian pendidikan dan kebidayaan menerapkan beberapa kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak selama masih berlangsungnya pandemic covid-19.

Penyebaran Covid-19 ini mengakibatkan tenaga pengajar dan siswa menjadi salah satu korban dari wabah Virus ini. Dampak yang dirasakan oleh sekolah atau siswa yaitu dampak negatif, mengapa dikatakan negative, karena mereka diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini menjadi sebuah hambatan pada proses belajar siswa yang dapat menurunkan minat belajar siswa. **(Suryani 2010 pada Jamaluddin 2020)**. Terlebih lagi banyaknya siswa yang tidak terbiasa dengan pembelajaran sperti ini yaitu pembelajaran online. Tidak menutup kemungkinan keadaan guru yang belum begitu paham mengenai teknologi internet atau pengguna media pembelajaran online yang bervasi seperti saat ini. Hal ini berdampak pada pembelajaran yang dilakukan kurang efesien kurangnya konsentrasi siswa dan sulitnya siswa dalam memahami pembelajaran yang diberikan guru.

Adanya virus covid-19 yang berdampak pada proses belajar siswa terutama di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan edaran berupa kebijakan untuk meliburkan siswa dan siswi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya dalam mencegah meluasnya virus ini. Dalam surat edaran yang diberikan oleh pemerintah menjelaskan tentang proses belajar dilakukan dirumah dengan proses pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilakukan untuk memberikan pengalaman baru berupa pengalaman belajar jarak jauh yang bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran daring atau jarak jauh lebih difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antra lain menganai pandemic yang sedang melanda yaitu Virus Covid-1

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya (KEMENDIKBUD) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah di Masa Darurat Penyebaran Covid-19, yang berisi tentang arahan pembelajaran dari rumah atau daring. Kegiatan BDR dimaksudkan untuk dapat memberikan hakekat pembejajaran atau nmakna kepada paera siswa akan proses belajar dengan kponsep lain.

Fenomena tentang proses belajar mengajar berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran sistem daring di seluruh sekolah di Indonesia khususnya di Kabupaten Boalemo, salah satu sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran daring adalah SDN 15 Tilamuta. Proses belajar adalah bagian dari kebijakan sekolah untuk memaksimalkan proses belajar siswa, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal mata pelajaran.

Namun pada penelitian awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa proses belajar mengajar sistem daring masih memiliki masalah atau kendala tertentu, diantaranya seperti: tidak maksimalnya penerimaan pelajaran oleh siswa saat proses pembelajaran daring berlangsung, kurangnya fasilitas pendukung dalam proses belajar,

kurangnya pengetahuan orang tua siswa tentang sistem pembelajaran daring dan kurangnya sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO” (Studi di SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo)

1.2 Rumusan masalah

Hasil uraian latar belakang diatas, dengan memperhatikan fenomena yang dijelaskan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan Implementasi kebijakan dalam proses belajar secara daring di SDN 15 Tilamuta.

1.3 Tujuan penelitian

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini yaitu,: untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan dalam proses belajar daring di Sdn 15 Tilamuta.

1.4 Manfat Penlitian

Yang menjadi mnfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan khususnya menyangkut pada Implementasi Kebijakan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada kepala sekolah berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian, guna mengembangkan penerapan kebijakan kepala sekolah pada proses belajar siswa dimasa pandemi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1. Konsep Kebijakan

Definisi kebijakan (*policy*) terkadang dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), programan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi pemerintahan atau lembaga yang memiliki tujuan untuk melaksanakan satu perubahan tertentu (Wahab, 2012)

United Nations (dalam Wahab, 2012) memberikan penejelasan tentang Kebijakan sebagai karakter dari aktor tertentu yang melaksanakan fungsi-funsgji administratif, baik

dalam bentuk pejabat, kelompok tertentu atau lingkup pemerintahan yang terlibat dalam kegiatan tertentu. Penjelasan yang sama disampaikan oleh **Islamy (2011)**, bahwa kebijakan publik adalah proses hasil rumusan keputusan yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik.

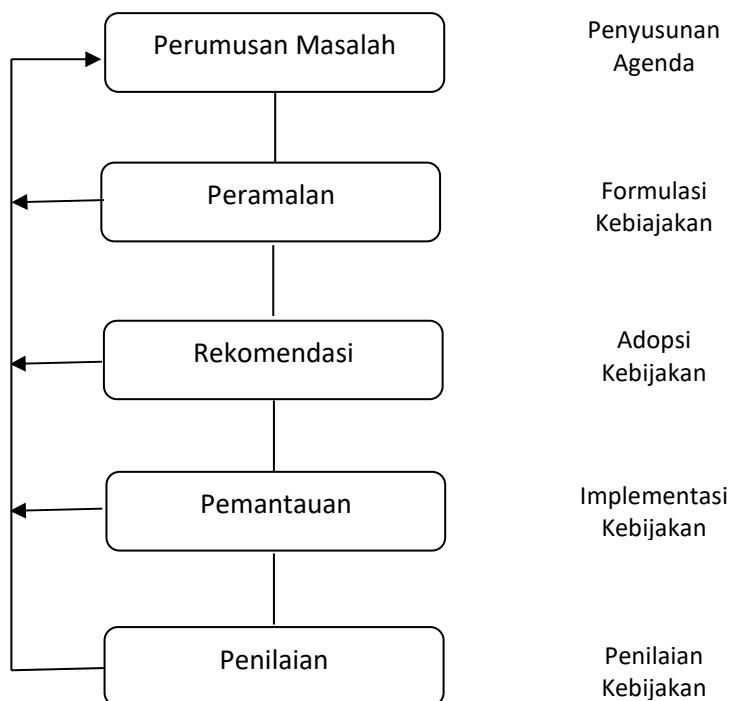
Pengertian tentang kebijakan public sangat luas konsep pendefinisianya, serta memiliki Beragam persepsi didalamnya. Dalam konsteks umum kebijakan publik lebih dipahami sebagai proses yang mengarah pada satu pencapaian tujuan perubahan akan penyelesaian masalah publik dengan berbagai macam pendekatan dan model yang digunakan, sedangkan dalam pandangan khusus kebijakan lebih dipahami pada penyelesaian konkrti akan masalah publik dengan mempertimbangkan siklus kebijakan publik.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya terjadi begitu saja, atau dengan kata lain tercipta dengan sendirinya. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang dan berliku yang public belakangi oleh berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah merupakan bagian terpenting yang harus dilihat sebelum lahirnya kebijakan. Banyak para public yang berkepentingan, baik sebagai perumus kebijakan, implementor kebijakan, sampai ubli yang terlibat dalam melakukan evaluasi atau kebijakan kurang memperhatikan hal ini. Kurangnya perhatian para publi terhadap proses kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara maksimal, atau justru terjadi kegagalan dan pada akhirnya bukanya menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru.

Tahapan dalam kebijakan public akan memberikan hasil yang baik, ketika tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik pula. Menurut **Dunn (dalam nugroho : 2012)** dalam

proses kebijakan 18ublic terdapat tahapan yang saling bergantungan yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahapan – tahapan yang saling berkaian tersebut dapat dilihat seperti gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Willaim N. Dunn, 1999:25

Gambar 1. Prosedur Analisis Kebijakan dengan tipe–tipe Pembuatan Kebijakan

Tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 18ublic. Melihat masalah yang ada dan berkembang di masyarakat begitu kompleks dan beragam dan tentunya masalah – masalah tersebut akan saling berkompetisi sebelumnya untuk masuk pada agenda kebijakan. Kompetisi masalah –

masalah yang ada, pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan untuk dipecahkan. Beberapa permasalahan yang ada ditentukan 19ubli pembahasan dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan tertentu dari para perumus kebijakan.

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan, kemudian masalah tersebut akan dibahas dan dicari solusi yang terbaik dari yang baik (Winarno, 2012, h. 36). Dalam tahap ini berbagai 19ublic19tive penyelesaian masalah akan saling berlomba untuk ditentukan, mana dari sekian 19ublic19tive penyelesaian masalah yang paling pantas dan terbaik untuk dijadikan solusi. Disinilah peran 19ubli akan sangat menentukan untuk 19ubl mengusulkan suatu pemecahan masalah yang terbaik yang dimiliki.

Setelah melewati beberapa tahapan, baik dari penyusunan agenda, sampai pada tahapan formulasi, dimana sekian banyak 19ublic19tive telah ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada kahirnya salah satu 19ublic19tive kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan masyarakat legislatif atau keputusan peradilan.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang sangat penting juga dalam proses kebijakan, yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tentu disadari bahwa suatu kebijakan, baik itu berupa program atau dalam bentuk peraturan lainnya yang telah dirumuskan secara matang tidak akan bernilai apa – apa atau hanya menjadi catatan semata, ketika tidak diimplementasikan. Keputusan yang telah dijalankan pada tahap selanjutnya akan dilakukan penilaian atau dievaluasi. Tahapan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Secara umum dapat dipahami bahwa penjelasan tentang proses kebijakan public sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan rangkaian yang sistematis dan tidak 19ubl terpisahkan antara tahapan – tahapan yang ada. Karena jika salah satu

saja tidak dilaksanakan, maka kebijakan itu tidak akan lahir atau tidak akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga proses sistemik dari kebijakan public tersebut dapat dikatakan merupakan aktifitas dengan bagaimana masalah itu dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan diambil, kebijakan dilaksanakan dan kebijakan dievaluasi.

2.2 Pengertian Implementasi

Berbagai macam tahapan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses kebijakan publik, memiliki sifat saling berketergantungan atau merupakan satu sistem yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan lainnya. Salah satu proses atau tahapan dari kebijakan tersebut adalah implementasi kebijakan. Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah suatu program di rumuskan dalam bentuk keputusan – keputusan (*decision*) oleh para aktor.

Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting dalam proses kebijakan publik. Penting karena implementasi adalah ukuran utama tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan keputusan (**Widodo, 2012**).

“Implementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (**Islamy, 2011**). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh **Edward III Winarno (2012)** yang mengatakan bahwa:

(implementasi kebijakan, seperti yang sudah disaksikan, adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui

perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak).

Bardach (parsons, 2011) mendefinisikan implementasi sebuah permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan Lester dan Stewart (**dalam Agustino, 2008**) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*).

Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan bukanlah suatu aktivitas tunggal (*single action*). Implementasi kebijakan, pada hakekatnya lebih sebagai sebuah proses yang akan terdiri atas serangkaian aktivitas fungsional penting. **Jones (dalam Wiyoto, 2005, h. 34)** mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokan kedalam 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu:

1. Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *translation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan).

2. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*” (Penetapan atau melakukan pengaturan terhadap sumberdaya, satuan-satuan organisasi dan metode

kerja untuk mendukung pelaksanaan program tindakan sehingga menimbulkan hasil tertentu).

3. Penerapan (*Application*)

Penerapan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan).

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administrator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.3 Model-model Impementasi Kebijakan Publik

Istilah model merupakan pengistilahan yang dipakai oleh para analis untuk melakukan kajian atau analisis terhadap objek penelitian tertentu. Penggunaan teori atau model dimaksudkan untuk mempermudah para peneliti atau analis memecahkan masalah – masalah yang sedang dikaji melalui pendekatan tertentu. **Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012)** menjelaskan bahwa model adalah “*a representation of something else, designed for a specific purpose*” (representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu). Jadi menurut definisi ini, yang dimaksud dengan model ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu.

Selanjutnya dalam alur pemikiran yang hampir sama **Thomas R. Dye (dalam Wahab, 2012:154)** mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*” (apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah sesuatu upaya menyederhanakan atau mengejewantahkan kenyataan politik).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, **Wahab (2012, h. 154)** mengatakan bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisi yang dilakukan, maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yang mampu menjelaskan hubungan kuasalitas antarvariabel yang menjadi fokus analisis.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat mencapai hasil yang baik, bila dimulai dari rencana yang tepat dan diimplementasikan dengan baik pula. Terkait dengan hal ini **Nugroho (2012)** menyatakan keberhasilan kebijakan publik yang direncanakan adalah 20 persen, sementara implementasinya 60 persen, sedangkan 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan, sehingga menjadi ancaman bagi konsistensi implementasi kebijakan.

Untuk memperkuat argumentasi tentang model implementasi kebijakan, berikut ini akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan analisa tentang masalah penelitian implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Model Van Metter dan Van Horn

Proses implementasi dalam rumusan Van Matter dan Van Horn pada dasarnya merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara searah dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

a. *Policy Standard and Objectives* (ukuran dan Tuntutan Kebijakan)

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

b. *Resources* (Sumber Daya)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu.

c. *Interorganizational communication and enforcement activities* (Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana)

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan kecil jarang terjadi.

d. *The characteristics of implementation of agencies* (Karakteristik Agen Pelaksana)

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implemenatai kebijakan publik. Hal ini bisa dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari formulasi masyarakat yang merasakan permasalahan yang dihadapi dan kebijakan dari atas yang mana para

pengambil keputusan tidak mengetahui dan merasakan permasalahan yang sedang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- e. *The economic, social and political environment* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik).

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal berpengaruh atau mendorong terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

- f. *The Disposition or respons of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana)

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain seperti yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapanya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya:

- I. Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:

- a. Kesukaran Teknis

Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan

indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakkan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.

II. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui:

1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.

3) Ketetapan alokasi sumberdaya

Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal

- 4) Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

- 5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.

- 6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan

- 7) Akses formal pihak-pihak luar.

Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

III. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Dukungan publik.

Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

d. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

3. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut Edward III dinamakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil, dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal (Winarno, 2012, h. 177). Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah:

1. Komunikasi

Suatu kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tujuannya dengan baik, manakala kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Mulai dari tingkatan pembuat kebijakan sampai pada tataran tingkat bawah selaku eksekutor dilapangan. Proses pentransformasian informasi yang merupakan konsep dari kebijakan mutlak

dilakukan kepada personil yang tepat dengan informasi yang tepat pula. Tentu saja, komunikasi-komunikasi haruslah akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika konsepnya atau petunjuknya tidak jelas, maka tentu para pelaksana (*implementor*) juga akan mengalami kebingungan apa yang harus mereka lakukan.

Winarno (2012, h. 179) menjelaskan bahwa, faktor komunikasi lain dalam implementasi kebijakan adalah:

“Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Selain itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan”.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi, yaitu adanya mispersepsi atau kesalahan pemahaman yang dapat memicu pertentangan diantara pelaksana program, sehingga dampaknya kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

- b) *Kejelasan*; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c) *Konsistensi*; Upaya melaksanakan kebijakan dengan penuh konsisten dan jelas akan memunculkan keberlangsungan dari kebijakan yang efektif. Konsistensi tersebut menyangkut tentang perintah-perintah pelaksanaan. Sekalipun dinilai bahwa perintah-perintah tersebut mengandung kejelasan, namun bertentangan, maka perintah tersebut justru akan membingungkan dan akan mempersulit para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

“Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. **Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 98)** mengemukakan bahwa faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud meliputi:”

- a) *Staf*, Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Olehnya staf yang mampu secara kompetensi dan

tercukupi secara kuantitas, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

- b) *Informasi*, Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. *Kedua*, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
- c) *Wewenang*, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementor dimata publik terjaga, sehingga para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara baik.
- d) *Fasilitas*, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal, serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. **Edward III (dalam Widodo, 2012, h. 104)** menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

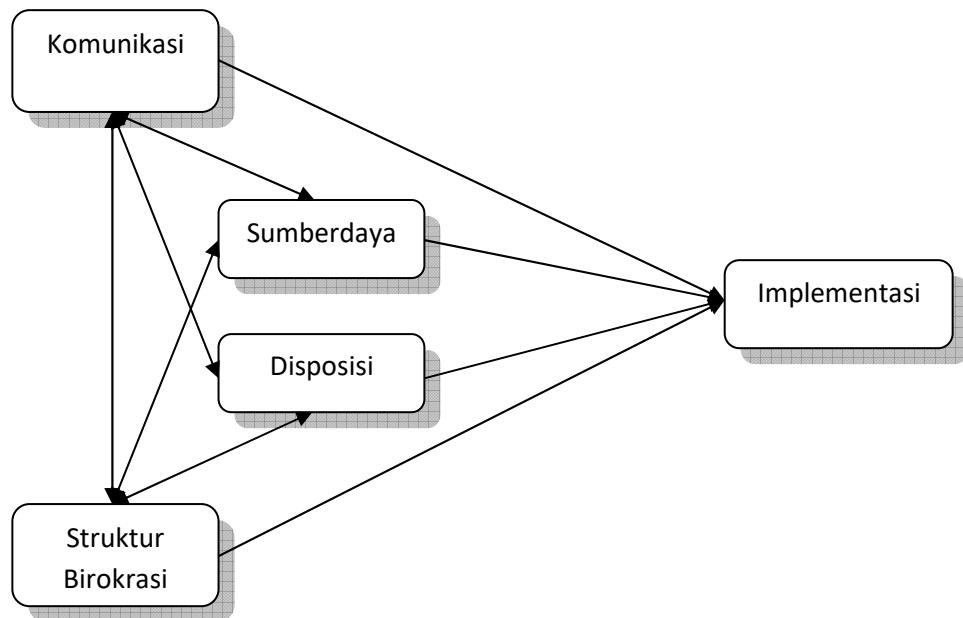
Variabel diaposisi menurut edward III, yaitu:

- a) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
- b) *Insetif*, Menurut edward III (dalam Winarno, 2012, h. 201) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanupulasi insetif-insetif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merubah personil dan birokrasi pemerintahan agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manupulasi insetif dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan tingkat tinggi untuk dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (**Agustino, 2008, h. 153**). **Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153)** bahwa untuk mengangkat kinerja struktur birokrasi yaitu dengan jalan melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *fragmentation* (fragmentasi), fragmentasi dimaksudkan sebagai upaya penyebaran tanggungjawab dibidang kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Model Implementasi menurut Edward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: George Edward III (dalam Agustino, 2008, h. 150)

Gambar 2. Model *Direct and Indirect Impact on Implementation*

(Geoge Edward III)

2.4 Pembelajaran Daring

Saat ini Corona Virus Disease 2019 (covid 19) masih menjadi topic hangat dan merupakan sebuah bencana yang tidak hanya melanda suatu daerah tapi seluruh Negara di dunia, hal ini membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk melaksanakan lockdown dalam langkah mencegah penyebaran virus, di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa Pemerintah daerah memutuskan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online.

Menurut **Meidawati, dkk (dalam Pohan, 2020:2)** pembelajaran daring *learning* merupakan pendidikan formal yang dilenggarakan oleh sekolah yang Guru dan Siswa berada di tempat yang berbeda sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan didalamnya.

Pembelajaran ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan.

Meidawati dkk (dalam Pohan, 2020:7) ada beberapa manfaat dari pembelajaran daring, yang dimana sebagai berikut:

- 1) Dapat membangun komunikasi dan diskusi yang efisien antara Guru dan Siswa.
- 2) Siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi antara Siswa lainnya tanpa melalui guru
- 3) Dapat memudahkan interaksi antara Guru, Siswa dan Orang Tua Siswa.
- 4) Sebagai sarana untuk ujian dan kuis
- 5) Guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada Siswa baik berupa gambar dan video
- 6) Siswa dapat dengan mudah mencari dan mengunduh bahan ajar.
- 7) Guru dapat membuat soal maupun kuis dimana saja tanpa batas waktu.

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring

a. Kelebihan:

- Peserta didik dapat mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan setiap saat.
- Peserta didik dapat lebih mudah berkomunikasi dengan pendidik kapan saja jika memerlukan informasi tambahan yang mendadak.
- Pendidik dan peserta didik dapat melakukan diskusi secara online untuk menambah ilmu pengetahuan.
- Peserta didik akan lebih mandiri dan lebih aktif.
- Proses pembelajaran akan lebih santai karena di tempat dan kondisi yang sesuai keinginan peserta didik.

b. Kekurangan

- Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik.
- Kecenderungan mengabaikan atau aspek sosial dan sebaliknya tumbuhnya aspek bisnis komersial.

- Proses pembelajaran cenderung kearah pelatihan daripada pendidikan.
- Peran pendidik menjadi berubah dari yang biasa menggunakan metode konvensional, kini dituntut mengetahui teknik pembelajaran menggunakan komputer.
- Peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar akan cenderung gagal.
- Tidak semua peserta didik mampu membeli keperluan untuk proses pembeleajaran daring
- Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet yang memadai.

2.5 Kebijakan Daring

Pembelajaran daring merupakan sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung antara Guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Beberapa Pemerintah daerah memutuskan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online.

Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Republik Indonesia terkait surat edaran Nomor 4 Tahun 2020, tentang pelaksnaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Cororna Virus Disease (covid 19). Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat Personal Computer (PC), Laptop atau Smartphone yang terhubung melalui koneksi jaringan internet. Guru dan siswa dapat melakukan

pembelajaran diwaktu yang sama menggunakan group di media social seperti Whatsup, Telegram, Intagram, dan aplikasi Zoom atau yang lainnya, meskipun berada di tempat yang berbeda.

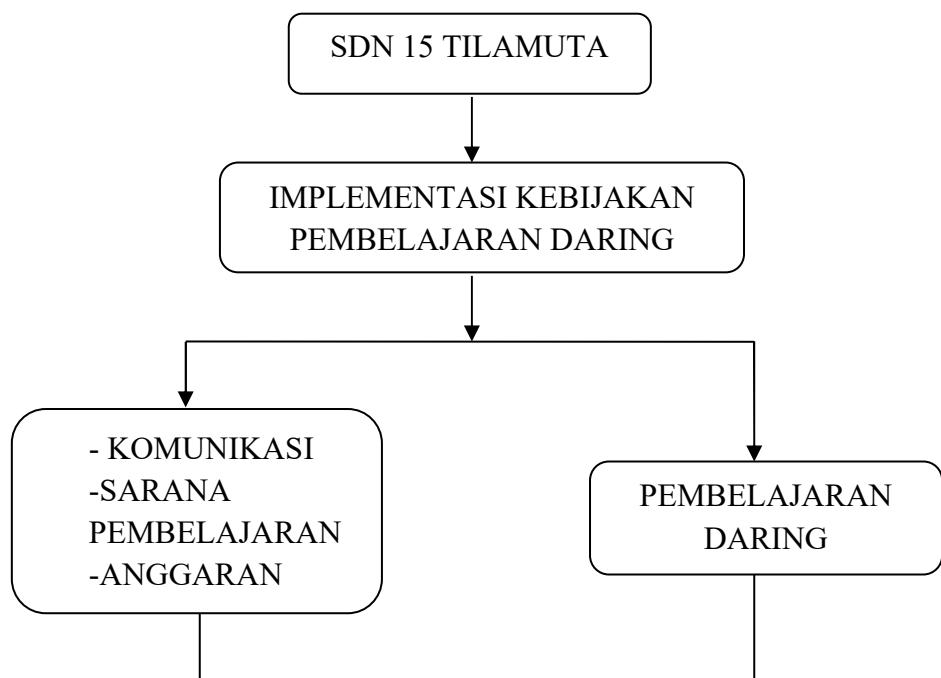
Pembelajaran daring dapat didefinisikan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang penyampaian materinya dilakukan lewat internet secara *syncromous* atau *asyncromous*. Pembelajaran daring biasanya dikenal dengan *e-learning*, pembelajaran virtual, dan pembelajaran jarak jauh. Istilah pembelajaran ini menyaratkan bahwa guru dan Siswa tidak harus bertatap muka secara langsung dalam proses pembelajaran melainkan dapatb menggunakan media teknologi digital berupa computer, laptop maupun smartphone yang memungkinkan fleksibiltas akses.

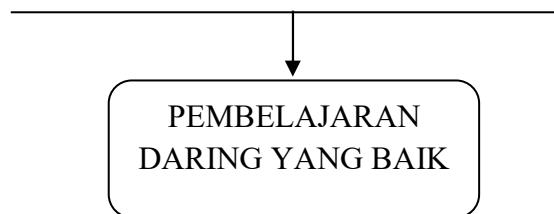
Pemerintah mengeluarkan kebijkan melalui kmendikbud untuk mengahadapi pembelajaran di masa covid-19, berupa mengeluatkam surat kputusan Bersama (SKB). Mempertimbangkan kebutuhan dalam mnjalankan pemnelajaran daring, berbagai masukan dari para ahli untuk menjalankan pembelajaran daring.

Bulan Maret s.d. April 2020, Kemendikbud melakukan penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Neger dan Perguruan Tinggi Swasta, realokasi anggaran Kebudayaan Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta pembelajaran daring.

2.6 Kerangka Pikir

Kebijakan dalam melakukan sistem pembelajaran dari merupakan salah satu kebijakan menteri pendidikan dalam memutus mata rantai covid-19, hal ini yang juga menjadi pemicu penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ini. Adapun yang teori yang dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu teori **Edward III dalam Widodo (2010-97)** tentang faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Penjelasan hal tersebut dapat dijelaskan melalui bagan berikut:





Gambar 3. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini menyangkut penerapan Implementasi Kebijakan terhadap sistem pebelajaran daring di SDN 15 Tilamuta, serta kebijakan apa saja yang diterapkan dalam proses belajar dan faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis terlebih dahulu menentukan obyek yang akan dijadikan bahan penelitian, kemudian menentukan jeneis penelitian apa yang akan diterapkan sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Penulis memilih jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2005:67) “ Metode penelitian deskrptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki atau melukiskan keadaan subyek-subek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya”.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah implementasi kebijakan penerapan pembelajaran daring yang di nilai dari:

1. Faktor komunikasi
2. Faktor sarana pembelajaran

3. Faktor Sumber Daya manusia

3.4 Informan

Informan adalah seseorang yang dipilih sebagai subyek yang menguasai masalah dari objek penelitian, dan dipilih secara purposive. Selanjutnya imforman diminta agar dapat memberikan infromasi kaitannya dengan apa yang ingin ditanyakan.

Adapun dijadikan informan penelitian ini:

- Kepala Sekolah : 1 orang
- Guru : 3 orang
- Siswa : 3 orang
- Orang tua siswa : 2 orang

3.5 Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari para informan di tempat penelitian dengan sumber datanya adalah wawancara dan observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara anatara lain:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan secara lisan yang diajukan kepada sumber data dan dijawab secara lisan pula. Metode wawancara ini dilakukan agar data yang didapat peneliti jelas dan akurat karena berasal dari sumber datanya langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam.
2. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan bersifat umum, yaitu untuk mendalami kegiatan yang terjadi jika dikaitkan dengan masalah penelitian.
3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang tersedia. Metode ini digunakan untuk manjaring informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dalam bentuk dokumen atau catatan.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model miles dan huberman sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2005) bahwa penelitian kualitatif proses analisis datanya mengedepankan analisis deskriptif, dengan beberapa tahapan, yaitu

1. Data *Reduction* (Reduksi data): Upaya untuk memilih dan memilih data yang relevan atau sesuai dengan tema dan materi penelitian dengan cara merangkum, memilih hal-hal penting, serta melihat pada sisi focus utama dalam penelitian.
2. Data *Display* (Penyajian data): Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam arti pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi (Menarik kesimpulan): Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan dilapangan dimana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Sekolah dasar negeri 15 adalah sekolah dasar yang terletak di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Sekolah dasar negeri 15 berdiri berdasarkan SK Nomor 425/853/DIKPORA/X/2017, pada tanggal 16 Oktober 2017 dan terletak di Jl. Kolonel Marthin Liputo.

4.2 Hasil Penelitian

Kebijakan penanganan pandemic covid 19 oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik melalui pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat, pemberlakuan system daring pada proses belajar dibidang pendidikan, sampai pada upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak krtistik dari pandemic covid. Dalam konteks pendidikan upaya untuk tetap memberlakukan proses belajar mengajar dilakukan melalui kebijakan system daring atau belajar dari rumah atau konsep jarak jauh dengan menggunakan fasilitas handpone atau secara on line. Dalam konteks tersebut peneliti berdasarkan focus penelitian tentang implementasi kebijakan pembelajaran daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta menemukan beberapa data factual, khususnya temuan data melalui wawancara, yaitu :

4.2.1 Komunikasi

Wawancara bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Tilamuta :

“Kebijakan daring ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat, bukan dinas atau bahkan kami yang membuatnya. Namun kalau ditanya tentang komunikasi pihak sekolah dengan orang tua siswa, itu sudah oasti kami lakukan. Prosesnya diserahkan kepada masing-masing guru kelas untuk menyampaikan kepada orang tua siswa akan penerapan pembelajaran daring online. Saya rasa orang tua juga sudah tau akan hal itu”. (tanggal 10 Februari 2022)

Hasil yang sama didapatkan dalam wawancara bersama Ibu wali kelas dua SDN 15 Tilamuta :

“Untuk informasi kebijakan daring kami sudah komunikasikan bersama dengan orang tua siswa, saya sendiri selaku penanggung jawab kelas dua sudah mensosialisasikan proses belajar daring melalui telpo langsung pada setiap orang tua siswa. Kalau ada orang tua yang tidak memahami itu, berarti ada hal yang perlu dijelaskan kembali pada orang tua siswa. Prinsipnya saya sudah sampaikan pada orang tua siswa kelas dua saya untuk itu” (tanggal 10 Februari 2022)

Wawancara dengan orang tua siswa menyebutkan :

“Kalau saya adalah orang tua siswa kelas tiga di Sekolah Dasar Negeri 15 Tilamuta. Belajar daring ini memang tujuannya untuk menggantikan proses belajar disekolah, tapi karena pandemic, jadi siswa belajar dirumah. Anak saya tiap hari belajar secara daring. Setiap proses belajar, sebelumnya guru selalu memberikan info melalui grub kelas orang tua siswa pembelajarannya” (Tanggal 13 Februari 2022)

Guru lainnya diawawancarai peneliti, yaitu :

“Daring ini memang disatu sisi memberikan kemudahan dalam beajar siswa, tapi disisi lain kebijakan daring ini menimbulkan masalah lain, yaitu tidak efektifnya komunikasi guru dan siswa. Banyak pelajaran yang disampaikan tidak bias diterima

dengan baik oleh siswa. Kalau saya untuk mata pelajaran yang saya ajarkan selalu saya sampaikan diawal. Namun lagi-lagi komunikasi kami dalam proses belajar memang terbatas. “(Tanggal 10 Februri 2022)

Wawancara lain dengan orang tua lainnya :

“Bagi saya sebagai orang tua cukup prihatin juga akan kebijakan dari ini. Masalah informasi telah kami dapatkan memang sejak awal, banyak juga melalui media tv diinformasikan, kami orang tua sudah tau. Tapi yang jadi msalah itu adalah proses pembelajarannya tidak maksimal didapatkan oleh anak-anak siswa. Apalagi kalau guru hanya santai juga, malah tidak ada apa-apa didapat itu” (Tanggal 13 Februari 2022).

Dari data waancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi pesan akan kebijakan daring telah dilakukan oleh pihak sekolah, khususny pada guru sebagai wali kelas. Komunikasi disni dimaksudkan adalah upaya pihak sekolah memberikan pemahaman yang baik pada orang tua dan siswa akan kebijakan pembelajaran daring melalui on line. Kebijakan yang diperoleh dari pemerintah pusat tersebut cukup dipahami oleh para orang tua siswa yang ada di sekolah dasar negeri 15 Tilamuta. Para orang tuapun telah mengetahu akan hal tersebut sejak awal penerapan kebijakan tersebut. Namun komunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran langsung dianggap kurang maksimal oleh para oirang tua. Proses pembelajaran kurang efektif diakibatkan adanya keterbatasan ruang dalam proses pembelajaran.

4.2.2 Sarana Pembelajaran

Salah satu indikator dari keberhasilan implementasi kebijakan apapun bentuk dari kebijakan tersebut adalah adanya dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil wawancara dengan informan tentang fokus dukungan

sarana pemebelajaran pada implementasi kebijakan pembelajaran daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Wawancara dengan Kepala Sekola Dasar Negeri 15 :

“Konsekuensi dari proses belajar daring itu adalah perlunya ketersediaan handpone dan data. Itu dua hal penting dalam belajar daring. Memang ketika kami melakukan pendataan, kami menemukan ada juga orang tua yang tidak memiliki fasilitas handpone android, sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Namun untuk kasus begitu kami minta guru kelas siswa untuk menghubungi lewat telepon atau mengirimkan tugas pada siswa tersebut, biar siswa itu ada bahan belajar” (Tanggal 10 Februari 2022).

Wawancara lainnya dengan guru wali kelas v sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta :

“Untuk sarana pemebelajaran pihak sekolah tidak menyediakannya, khususnya masalah handpone ya, itu menjadi urusan orang tua. Kecuali masalah paket data, biasanya ada bantuan data internet gratis dari pemerintah itu langsung ke nmor orang tua siswa. Memang kendalanya itu di Handpone android, ada beberapa siswa yang tidak memiliki, sehingga saya sebagai wali kelas juga harus bepikir keras bagaimana caranya pelajaran tetap mereka dapatkan” (Tanggal 10 Februari 2022).

Orang tua siswa juga diwawancarai dengan pernyataan:

“Anak saya termasuk yang tidak makimal belajar daring. Bukan soal Handponenya, tapi masalah data. Kan pelajaran ini setiap hari, data juga kalau diisi cepat seklai habis, sementara pemebelajarannya sampai dua jam. Kadang juga jaringannya bermasalah. Pokonya bagi saya susah ini pemebelajaran daring, lebih baik sekolah langsung saja” (Tanggal 13 Februari 2022).

Orang tua siswa lainnya juga diwawancara mengatakan :

“Susah mau belajar on line, saya tidak punya handpone android. Jadi selama pemebalajaran daring anak saya tidak dapat pelajaran dari guru. Teman-temannya yang lain bias belajar baik, karena ada handpone, anak saya hanya belajar seadaanya saja. Itupun nanti guru kirim tugas saja” (Tanggal, 13 Februari 2022).

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara tentang indicator keberhasilan implementasi kebijakan program belajar daring melalui dimensi dukungan sarana adalah untuk ketersediaan sarana penunjang pembelajaran daring adalah bagian dari tanggung jawab orang tua siswa masing-masing, khususnya berkaitan dengan handpone android. Sedang untuk data internet adalah sebagian diberikan bantuan oleh pemerintah pusat melalui menteri pendidikan dan kebudayaan. Kendala dalam proses belajar tersebut terlihat dari adanya orang tua yang tidak memiliki fasilitas handpone android.

4.2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam konteks implementasi kebijakan adalah salah satu indicator penting yang juga mendukung tujuan dari kebijakan setelah dirumuskan. Dimensi sumber daya manusia adalah indicator terpenuhinya aktor pelaksana kebijakan dilapangan. Karena pada prinsipnya ketersediaan aktor pelaksana adalah mutlak harus disiapkan jauh sebelum rumusan kebijakan itu dibuat.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan program belajar daring adalah sebagai berikut :

Wawancara dengan kepala sekolah dasar negeri 15 Tilamuta :

“Kalau ditanya mengenai guru dan tenaga staf di sekolah ini secara umum ya belum cukup ya, artinya masih kurang. Faktannya kami punya guru wali kelas yang

menghendel dua kelas sekaligus. Jadi masalahnya memang juga ada kalau dilihat dari sisi sumber daya manusia. Kewalahan memang guru kami, apalagi dalam porses pembelajaran daring” (tanggal 10 Februari 2022).

Keterangan yang sama diperoleh bersama salah staf sekolah dasar negeri 15 Tilamuta :

“Ya memang benar, sekolah kami memang masih kekurang guru untuk beberapa mata pelajaran, bahkan ada wali kelas juga yang terpaksa harus ditangangi oleh satu guru perwalian” (Tanggal 10 Februari 2022).

Salah seorang guru yang diwawancara menyebutkan :

“Kalau hanya sumber daya manusia disekolah ini, memang kurang, tapi kami masih bisa menangangi kekurangan itu dengan berbagi tugas agar pembelajaran tetap berlangsung. Untuk program belajar daring kami memang masih bias melaksanakannya karena selain ada guru yang menangani, kami juga bias berbagi waktu dengan siswa untuk waktu-waktu belajarnya” (Tanggal 10 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, sekolah dasar negeri 15 Tilamuta masih mengalami kekurangan guru dalam mendukung kelancaran belajar. Hasil temuan bersama para informan menunjukkan juga bahwa proses belajar mengajar di sekolah dasar negeri 15 Tilamuta tidak begitu maksimal dan bahkan memberikan efek psikologi yang kurang baik bagi guru yang mengajar dan menangani dua kelas sekaligus. Permasalahan sumber daya manusia menjadi sangat penting bagi sekolah untuk ditindaklanjuti peningkatannya, karena hal tersebut dapat memberikan dampak kurang baik pada perkembangan pendidikan dan pembangunan sekolah.

4.3 Pembahasan

Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung terwujudnya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah dimensi penting dari faktor penentu dari ukuran konsep kebijakan publik. **Edward III (dalam Nugroho, 2012)** menyatakan bahwa tanpa sebuah implementasi yang jelas, maka kebijakan hanya menjadi sebuah catatan kertas yang tidak ada ujungnya, sehingga penilaian public akan kinerja pemerintah juga negatif disebabkan oleh adanya pembangunan yang tidak dijalankan.

Implementasi kebijakan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan melalui kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, serta adanya teknik sinergitas yang digerakkan untuk saling bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Jika dicermati sejarah pembangunan di Indonesia, telah banyak dilahirkan rumusan kebijakan pembangunan manusia yang kemudian dijabarkan kedalam program-program konkrit pemerintah pusat sampai ketingkat pemerintahan dibawahnya. Namun untuk melihat apakah adanya keberhasilan atau tercapainya tujuan kebijakan perlu ada indikator jelas dalam pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konteks dimana pelaksanaan program belajar daring pada sekolah dasar negeri 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo tiga indikator implementasi yang digunakan oleh peneliti dalam menilai dan menganalisis permasalahan pelaksanaan kebijakan dilapangan, baik faktor komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian informasi kepada orang tua siswa akan kebijakan tersebut, serta sistem belajarnya, penggunaan fasilitas apa saja. Hasilnya hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak sekolah, lebih khusus oleh guru perwakilan kelasnya masing-masing.

Penyampaian pesan ini menjadi penting agar dapat dipahami oleh penerima dampak dari kebijakan tersebut dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena satu kebijakan tanpa penyampaian atau bentuk komunikasi yang jelas antar dua belah pihak, maka proses dan tingkat keterterimaan dari orang tua siswa tidak akan noda dan pada akhirnya tujuan program tidak tercapaui sebagaimana diharapkan. Kebijakan tidak hanya dilihat pada tataran rencana saja, namun perlu disosialisasikan dengan baik kepada semua yang berkepentingan, sehingga dapat memberikan satu kesepahaman dalam pelaksanaannya. **Solichin A. Wahab (2012)** menjelaskan bahwa langkah pembentukan pemahaman akan konsep kebijakan menjadi sangat urgen, mengingat akan terjadi kesemrautan dalam bahkan sampai pada taraf tidak diterimanya kebijakan tersebut oleh sasaran kebijakan.

Hal lain juga yang dinilai oleh peneliti adalah indikator dukungan sarana dalam pelaksanaan program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 Tilamuta. Dukungan akan sarana menurut **Edward III (dalam winarno, 2012)** adalah bagian penting lainnya yang akan memastikan tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Para aktor pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kebijakan, tapi juga harus ditunjang dengan dukungan infrastruktur memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kendala teknis dalam proses belajar daring salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas handpone bagi sebagian orang tua siswa. kendala teknis berupa handpone tersebut adalah salah satu sarana penunjang pelaksanaan kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, lebih khusus dari pihak sekolah. Perlu adanya upaya lain yang lebih konkret untuk menangani masalah teknis tersebut.

Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan juga sangat tergantung oleh indicator sumber daya manusia. Sumber daya manusia dimaksudkan adalah mereka sebagai aktor pelaksana kebijakan yang terlibat langsung dilapangan. Satu kebijakan tanpa dukungan

aktor pelaksana hanya akan menjadi kebijakan tanpa pelaksanaan yang dapat dinilai sebagai sebagai kebijakan catatan kertas tanpa tujuan. Dalam pelaksanaan program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru sebagai tenaga pendidik utama dalam proses belajar belajar kurang tersedia. Hal ini akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak maksimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga akan lebih terjamin apabila didukung adanya komitmen yang rekatif tinggi dari pihak implementor terhadap tujuan kebijakan dan penataan akses formal yang disediakan kepada kelompok diluar jajaran lembaga pelaksana. Khususnya kelompok penerima manamaaf kebijakan, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Edward III dalam Nugroho (2012) menjelaskan bahwa para aktor pelaksanaan kebijakan tidak hanya dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan atau skilnya individualnya, namun harus terus menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dilaksanakan karena hal itu akan menumbuhkan komitmen kerja dari actor tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Keseimpulan

Dari uraian bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah imlementasi program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum telah dengan baik. Adanya kendala dan permasalahan dalam proses belajar mengajar tidak lepas dari dukungan komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan kepada orang tua siswa telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal dukungan sarana berupa handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar secara daring. Hal ini tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar daring diberlakukan kembali. Implementasi program belajar daring juga terkendala oleh tenaga guru yang kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring.

5.2 Saran

Saran yang bisa diberikan berdasarkan kesimpulan sebelumnya adalah pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan dukungan implemenasi kebijakan, berdasarkan tiga indiktaor dalam penelitian ini, baik factor komuniaksi kebijakan, factor sarana dan sumber daya manusia berupa guru. Saran ini bersifat secara universal untuk sekolah dasar negeri 15 Tilamuta kedepan, mengingat proses belajar tatap muka telah dimulai dan tentu secara otomatis proses belajar daring tidak dilakukan lagi. Namun bukan tidak mungkin proses belajar belajar daring akan kembali diberlakukan sering ketika pandemic covid kembali meningkat. Olehnya perlu kesiapan sejak dini pihak sekolah dalam menangangi masalah tersebut. Secara umum sarana pembelajaran juga sudah harus disiapkan oleh sekolah dan orang tua dalam proses belajar mengajar, termaksud hal yang paling penting adalah dukungan tenaga guru. Tenaga guru harus

ditambah, pihak sekolah harus mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AKIB, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No.1* , 11.

Dr, H. S. (2014). *MENINGKATKAN KINERJA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH MELALUI MANAGERIAL SKILLS*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Dr. H. Tachjan, M. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPi Bandung.

- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR Celeban Timur UH III/548.
- Irsanya, M. (2015). Konsep Implementasi Kebijakan. 12-22.
- Lestari, A. S., & Hamka, S. R. (2009). Analisis PIECES dalam Implementasi Kebijakan E-Learning di IAIN Kendari. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* , 110.
- MARIA, R., TAUFAN, J., GISTITUATI, N., & MARSISDIN, S. (2021, Juni Jumat). Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran Pada Masa Pandemi Bagi Siswa Kebutuhan Khusus Di MTs 10 Tanah Datar. *JURNAL PENDIDIKAN KEBUTUHAN KHUSUS* , pp. 89-95.
- Nurwan, T. W. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR. *JESS (Jurnal Of Education on social Science)* , 201-212.
- Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M. (2017). *MANAJEMEN & KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prof. Drs. Budi Winarno, M. P. (2012). *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS)*. Pringwulung: PT. BUKU SERU.
- Sawitri, N. W. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING. *Analisis Kebijakan* , 16.
- SILABUS.WEB.ID. (2016). Pengertian Kepala Sekolah. *Informasi Pendidikan dan Kebudayaan* , 1-3.
- Sodik, A. (2013). Meningkatkan Profesional Guru. *Kepala Sekolah* , 9-20.
- Sri Harnani, S. (2020, Juli Selasa). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DIMASA PANDEMI COVID-19. *BDK JAKARTA KEMENTERIAN AGAMA RI* , p. 1.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Waw
anca
ra
Kepa
la
Seko
lah



Wawancara Guru



Wawancara Siswa



Wawancara Oang Tua Siswa

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH DAN GURU

1. Secara umum bagaimakah penerapan kebijakan daring selama disekolah
2. Apakah diberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang sebelum kebijakan daring dilaksanakan
3. Bagaimana bentuk sosialisasi kepada orang tua siswa
4. Apa saja pesan yang disampaikan dalam sosialisasi tentang daring kepada orang tua siswa
5. Apa saja hambatan yang diperoleh dalam menjalankan sosialisasi tentang kebijakan daring kepada orang tua siswa
6. Sejauh apa tidak ada keluhan tentang tentang pembelajaran daring.
7. Bagaimana ketersediaan sarana penunjang bagi guru dalam kebijakan pembelajaran daring.
8. Apakah pihak sekolah menyediakan sarana berubah hanphone dalam proses belajar daring.
9. Apakah ada kendala dalam proses belajar daring selama berjalan.
10. Apakah ada siswa yang tidak memiliki saran berupa handphone atau yang lainnya dalam mengikuti daring? Jika ada apa kebijakan sekolah dalam menanggapi hal tersebut.
11. Bagaimana dengan masalah kuota internet bagi guru dan siswa apakah disediakan oleh sekolah atau seperti apa.
12. Apakah ada anggaran sekolah atau pihak dinas yang mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran.

PEDOMAN WAWANACARA ORANG TUA SISWA DAN SISWA

1. Apakah bapak/ibu deberikan sosialisasi terlebih dari pihak sekolah terkait pembelajaran daring.
2. Bagaimana bentuk sosialasasi yang disampikan oleh pihak sekolah atau guru.
3. Apakah bapak/ibu memahami dengan baik sosialisasi tersebut.
4. Apakah selama berlangsungnya pembelajaran daring tidak ada kendala yang dihadapi dalam proses belajar daring oleh bapak/ibu.
5. Apakah sekolah tidak menyediakan sarana penunjang dalam belajar daring
6. Bagaimanakah dengan kuota internet dalam pembelajaran daring apakah disediakan sekolah atau diupayakan sendiri oleh orang tua siswa.

ABSTRACT

SRI YUNITA LATIF. S2118094. IMPLEMENTATION OF ONLINE LEARNING POLICY AT SDN 15 TILAMUTA IN BOALEMO DISTRICT

This study aims to determine the implementation of an online learning policy at SDN 15 Tilamuta. It employs a qualitative method. The data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is interactive analysis. The results of the study indicate that in general the online learning implementation in SDN 15 Tilamuta, Tilamuta Subdistrict in Boalemo District has been well. The obstacles and problems in the teaching and learning process cannot be separated from the support of good communication. It has been done by delivering policy messages to parents of students. It has been carried out by the school. Meanwhile, terms of supporting facilities in the form of cellphones, it is still an obstacle in the online teaching and learning process. It requires strategic steps in the future if the online learning process is reinstated. The online learning implementation is also constrained by the lack of teachers supporting the learning process of teaching online. However, the learning process continues with a learning time setting system by each class and subject teacher.

Keywords: policy implementation, online learning



ABSTRAK

SRI YUNITA LATIF. S2118094. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan dalam proses belajar daring di SDN 15 Tilamuta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah analisis interaktif data yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian adalah implementasi program belajar daring di sekolah dasar negeri 15 Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo secara umum telah dengan baik. Adanya kendala dan permasalahan dalam proses belajar mengajar tidak lepas dari dukungan komunikasi yang baik, berupa penyampaian pesan kebijakan kepada orang tua siswa telah dilakukan oleh pihgak sekolah. Sementara dalam hal dukungan sarana berupa handpone masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar secara daring. Hal ini tentu perlu langkah-langkah strategis kedepan jika proses belajar daring diberlakukan kembali. Implementasi program belajar daring juga terkendala oleh tenaga guru yang kurang dalam mendukung proses belajar, mengajar daring. Sekalipun proses belajar tetap berjalan dengan sistem pengaturan waktu belajar oleh masing-masing guru kelas dan mata pelajaran.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pembelajaran daring



21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	8%
	Internet	
2	core.ac.uk	5%
	Internet	
3	repository.ub.ac.id	3%
	Internet	
4	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
5	adoc.pub	<1%
	Internet	
6	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
7	scribd.com	<1%
	Internet	
8	repository.umy.ac.id	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

PAPER NAME

SKRIPSI_S2118094_SRI YUNITA LATIF_I
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN
PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TIL

AUTHOR

S2118094 SRI YUNITA LATIF

WORD COUNT

6985 Words

CHARACTER COUNT

47041 Characters

PAGE COUNT

46 Pages

FILE SIZE

114.8KB

SUBMISSION DATE

Jun 15, 2022 1:33 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 15, 2022 1:35 PM GMT+8

● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

9	repository.fisip-untirta.ac.id	<1%
10	neliti.com	<1%
11	id.scribd.com	<1%
12	xerma.blogspot.com	<1%
13	repository.uinjambi.ac.id	<1%

[Sources overview](#)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 131/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.A.P
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : SRI YUNITA LATIF
NIM : S2118094
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerapan Pembelajaran
Daring Di SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **21%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan
Drs. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi
Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.A.P
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus UINSA Gorontalo 103 - 106 Achmed Nadjomuddin No. 17 Kota Gorontalo
Tele: (0435) 8724466, 829919 E-Mail: lembagapenelitian@uin-gorontalo.ac.id

Nomor : 3664/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lataran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala KESBANGPOL Kabupaten Boalemo

di:

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Yunita Latif
NIM : S2118094
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : SDN 15 TILAMUTA
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEHILAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15 TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya dicapukun banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat: Jl. Syafruddin Dosa Magedanu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol/137/XI/2021

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo setelah membaca Surat dan Ketua LEMLIT Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 3664/PIP/LEMLIT-UNTSAN/GTO/XI/2021 Tanggal 13 November 2021 Perihal Permohonan Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada

Nama : Sri Yunita Latif

NIM : 82118094

Fak/Prodi : Ilmu Sosial Politik/ Ilmu Pemerintahan

Alamat : Desa Picoliyanga Kecamatan Tilamuta Kab.Boalemo

Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Penerapan Pembelajaran Daring di SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo"

Lokasi Penelitian : SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo

Waktu : 3 (Tiga) Bulan Terhitung sejak tanggal 23 November 2021 s.d 23 Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

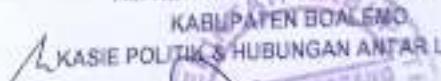
1. Sejasa mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah selempat yang menjadi obyek penelitian
2. Tidak diperbolehkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian
3. Selelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 23 November 2021
A.n KEPALA KANTOR KESBANG POL

KABUPATEN BOALEMO

KASIE POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


SRI HASTUTY AMIR, SE
NIP. 19781229 200701 2 008

Tentukan :

1. Yth. Pj. Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua LEMLIT Universitas Ichsan Gorontalo
3. Yth. Kadis Dikpora Kabupaten Boalemo
4. Yth. Kepala SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo
5. Yang bersangkutan

Atas



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SDN 15 TILAMUTA

Alamat: Jl. Raya Boalemo-Lutu Dua, Peta Lutu, Kec. Lutu, Kab. Boalemo, Nusa Tenggara Barat 85311



SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 431.2.07/SDN 15/TH/2022

Yang Bernama Tangan Tihowah Ibu

Nama : Diana Idrus Amrain, S.Pd
Nip : 19700227 199303 2 005
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SD Negeri 15 Tilamuta

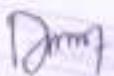
Dengan Ini Menerangkan Bahwa

Nama : Sri Yunita Latif
Nim : S2118094
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar – benar melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING DI SDN 15
TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO” selama 1 Bulan terhitung dari tanggal 13 Desember
2021 sampai dengan 12 Januari 2022.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
KEPALA SDN 15 TILAMUTA


DIANA IDRUS AMRAIN, S.Pd
NIP : 19700227 199303 2 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : SRI YUNITA LATIF
TTL : BUOL, 03 APRIL 2000
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO



NAMA ORANG TUA

- AYAH : SUARDI LATIF
- IBU : INAR TAHIR

NO	TAHUN	JENJANG	ALAMAT	KET
1	2006 – 2010	SDN 11 LIPUNOTO	BUOL	PINDAH
	2010 – 2012	SDN 15 TILAMUTA	TILAMUTA	BERIJAZAH
	2012 - 2015	SMP N 1 TILAMUTA	TILAMUTA	BERIJAZAH
	2015 – 2018	SMK N 1 BOALEMO	TILAMUTA	BERIJAZAH
	2018 - 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH